

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Adlina Daeng Barang

NIM. C05216045



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Adlina Daeng Barang

NIM : C05216045

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (*Siyāsah*)

Judul Skripsi : Analisi Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-
XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku
Utara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 27 Juli 2020

Saya yang menyatakan


Nurul Adlina Daeng Barang
C05216045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Adlina Daeng Barang NIM. C05216045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2020

Pembimbing,



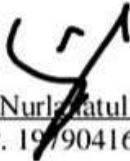
Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc. M.Ag
NIP. 1979041620060422002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Adlina Daeng Barang, NIM : C05216045 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, pada hari Selasa 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah dan Hukum.

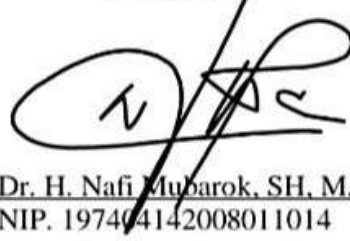
Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Dr. Nurul Fatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 1979041620060422002

Penguji II




Dr. H. Nafi Mubarak, SH., M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Arif Wijaya SH.M., Hum.
NIP. 19710719200501100

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 11 Agustus 2020

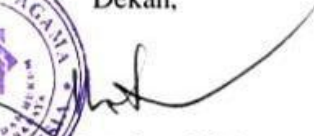
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Adlina Daeng Barang
NIM : C05216045
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : adlinadaeng99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHAN HASILPEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**

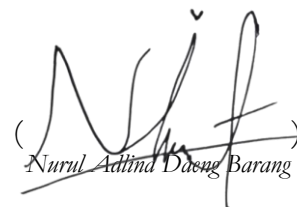
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Januari 2022

Penulis


(Nurul Adlina Daeng Barang)

satu tujuan dari pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibaca pada bagian konsideran menimbang (a), yang berbunyi sebagai berikut:

“bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemilukada langsung sesungguhnya sudah diintrodusir dalam produk hukum yang mengatur pemerintahan di daerah jauh sebelum pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah ditegaskan, Kepala Daerah yang karena jabatannya adalah Ketua dan Anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) yang berfungsi menjalankan roda pemerintahan dipilih menurut UU khusus yang akan ditetapkan kemudian. Pada bagian penjelasan dikatakan, ketentuan demikian karena kepala daerah adalah orang yang dekat dan dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus dipilih langsung oleh rakyat. Karena proses pembentukan UU Nomor 1 Tahun 1957 tersebut lama, untuk sementara Kepala Daerah dipilih oleh DPRD yang bersangkutan, yang kemudian disahkan oleh presiden/Menteri Dalam Negeri.

Dengan perubahan itu, pada dasarnya pilkada secara langsung merupakan kelanjutan dari *institutional arrangement* menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses pemilihan langsung akan mendapat *mandate* dan dukungan yang lebih riil dari rakyat sebagai wujud kontrak social antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Karenanya kemauan orang-orang yang memilih (*volonte generale*) akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya.

Dalam perspektif filosofis, munculnya gagasan tentang pilkada secara langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah-daerah yang sedang dimulai. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang kredibel dan didukung oleh rakyat. Pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menjadi instrument pergantian politik, di mana orang terbaik di daerah bisa tampil. Akan lahir orang-orang baru yang lebih bersih dan jujur. Cita-cita bersama ini tidak lain agar dapat mewujudkan hak-hak esensial individu, munculnya moral otonomi dan pada akhirnya melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan pada seluruh warganya.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pilkada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. *Pertama*, sistem demokrasi langsung melalui pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan

tidak mengikuti prosedur yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, dapat dinyatakan tidak sah. Demikian halnya apabila keputusan negara itu tidak memenuhi persyaratan material artinya isinya tidak benar, atau apabila dalam bentuk norma hukum, ia bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, maka keputusan negara itu dapat dinyatakan tidak sah meskipun proses pembentukan sejalan dengan prosedur formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Munculnya permasalahan mengenai perselisihan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku utara pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara karena warga di keenam desa tersebut enggan menggunakan hak pilihnya lantaran lokasi pemungutan suara yang tak sesuai dengan domisili pada kartu tanda penduduk (KTP). Sebab, di dalam KTP mereka berdomisili di Halmahera Barat akan tetapi mereka dimasukkan ke dalam daftar pemilih di Halmahera Utara. Permasalahan ini menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Bahwa dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018 telah terjadi pelanggaran baik sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara banyak adanya suara yang tidak sah, tidak hanya itu sekitar 1125 pemilih tidak dapat mencoblos dan terjadinya politik uang, yang terstruktur, sistematis dan masif.

Diajukannya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku

Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal 7 Juli 2018 sepanjang perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat. Dan juga permohonan menyatakan sah hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 desa tersebut dan Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Serta permohonan dalam menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

Dalam konteks pemilihan Kepala Daerah yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tentunya di dalamnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam mengadakan pemilihan kepala pemerintahan daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat kompherensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian “Analisis *Fiqh Siya>sh* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-

permasalahan mengenai problematika Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Terhadap Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiasi diantaranya:

1. *“Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Tinjauan Atas Pengisian Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).”* Skripsi ini ditulis oleh Engkus Kuswara Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia. Skripsi ini menjelaskan pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara tinjauan atas pengisian jabatan gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta.¹⁰ Dimana skripsi ini jika dibandingkan dengan skripsi saya objek kajiannya lebih ke pengisian jabatan gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Sedangkan skripsi penulis mengkaji terkait Analisis Fiqh Siyāḥ Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.
2. *“Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.”* Jurnal ini ditulis oleh Taufiqurrohman Syahuri Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dalam jurnal ini menjelaskan putusan mahkamah konstitusi tentang perselisihan hasil penghitungan

¹⁰Engkus Kuswara, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Tinjauan Atas Pengisian Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia, T.th.

Bab Ketiga, Data Penelitian memuat tentang Pertimbangan Hukum Hakim Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI.2018.

Bab Keempat, Analisis Data, memuat pembahasan penyelesaian Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk menjawab permasalahan dianalisis dengan *Fiqh Siyasah* dan Yuridis.

Bab Kelima, Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan semikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syari'at* yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siya>sah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siya>sah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*.

Pembahasan dalam *siya>sah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siya>sah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan

lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

3. *Al-sulthah al-qadha'iyah*

Al-sulthah al-qadha'iyah adalah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan negara lain yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum

Pada tanggal 20 September 2018, Kuasa Hukum Termohon telah mengirimkan surat Permohonan Penjelasan kepada Mahkamah mengenai teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara dimana dalam surat balasannya tertanggal 24 September 2018, Mahkamah menyatakan bahwa permasalahan yang ditanyakan adalah permasalahan teknis Pemungutan Suara Ulang yang menjadi kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara.

Termohon telah mengajukan surat kepada KPU RI mengenai permohonan petunjuk dan arahan dalam Pemungutan Suara Ulang dimana KPU RI telah memberikan balasan surat yang berisi mengenai petunjuk teknis dan arahan dalam rangka Pemungutan Suara Ulang, dimana KPU RI telah memberikan balasan surat yang berisi petunjuk teknis dan arahan yang pada pokoknya pelaksanaan PSU merujuk pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya yang mengatur mengenai pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

Terkait dengan pelaksanaan PSU di 6 Desa Kecamatan Kao Teluk, Termohon telah memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Utara dan KPU Kabupaten Halmahera Barat beserta dengan jajarannya untuk melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga masyarakat yang ada di 6 yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetewang, Desa Gamsungi, Desa Dum-dum, Desa Akelamo Kao dalam rangka penyusunan daftar pemilih tetap secara *de facto*, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu

Keluarga (KK) yang masih berlaku masing-masing pemilih yang memiliki hak pilih, baik yang memiliki identitas KTP atau KK Kabupaten Halmahera Utara maupun Kabupaten Halmahera Barat.

KPU Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan PPDP dari Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara juga Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi pasangan calon, melakukan pencocokan dan penelitian secara langsung terhadap warga masyarakat di 6 desa untuk menyusun DPT secara *de facto* sesuai dengan KTP dan KK masing-masing pemilih yang masih berlaku. KPU Provinsi Maluku Utara juga melakukan pencermatan data pemilih di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, untuk memutakhirkan data pemilih yang sudah meninggal atau sedang berada di luar daerah, sehingga terhadapnya Formulir C-6 tidak dibagikan.

Proses PSU yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2018 berjalan dengan tertib, aman dan lancar, tidak ada hambatan yang berarti dalam proses distribusi logistik PSU, pelaksanaan PSU, dan penghitungan Hasil Perolehan Suara PSU. Selama pelaksanaan PSU yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu tertentu sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melaksanakan PSU sesuai dengan aturan yang dan selama pelaksanaannya berjalan dengan tertib dan lancar.

putusan mahkamah konstitusi pada tanggal 21 September 2018 Bawaslu Maluku Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara perihal Pengawasan Pelaksanaan PSU dan Pembentukan TPS.

Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Bawaslu Maluku Utara melakukan pembentukan Tim Khusus Pengawasan PSU yang bertugas melaksanakan pengawasan PSU di wilayah 6 (enam) desa yakni Desa Akelamo Kao, Bobaneigo, Dum-dum, Gamsungi, Pasir Putih, dan Tetewang. Dibentuknya tim khusus ini agar PSU tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya kecurangan yang akan timbul kembali dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

Selain itu terdapat temuan Nama dan NIK ganda pasca penetapan DPT PSU pada 6 (enam) desa sengketa Halmahera Barat dan Halmahera Utara, dengan bukti-bukti yang tertera dengan jelas adanya kecurangan selama proses PSU ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan adanya nama-nama ganda atau lebih dari satu setelah penetapan DPT dan juga adanya NIK ganda yang digunakan agar paslon tertentu mendapatkan suara yang lebih.

Sementara itu juga Bawaslu juga menemukan adanya pelanggaran lain yang dilakukan oleh Bupati Halmahera Barat yaitu melakukan pertemuan dengan masyarakat di 6 desa yakni Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Pasir Putih, Desa Dum-dum, Desa Gamsungi dan Desa Akelamo Kao diduga dilakukannya

pertemuan tersebut masyarakat disuruh memilih paslon tertentu. Namun begitu Bawaslu Provinsi Maluku Utara mendengar akan adanya pertemuan tersebut Bawaslu langsung menyikapi dengan tegas pertemuan antara Bupati Halmahera Barat dengan masyarakat di 6 (enam) desa.

Pada tanggal 3 Oktober 2018 Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan adanya penggantian jabatan oleh Abdul Gani Kasuba pada tanggal 21 sampai dengan 22 September 2018, di lingkungan Pemda Provinsi Maluku Utara. Dan juga pada tanggal tanggal 16 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan pelanggaran mutasi ASN oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Sula, namun setelah dilakukan kajian ternyata tidak cukup bukti dan pemeriksaan dihentikan.

Bawaslu Kepulauan Sula menemukan adanya dugaan *money politic* oleh Gubernur *incumbent* kepada saudara Pardi Djufri yang sementara masih dalam proses pembahasan. Dan juga Bawaslu Kepulauan Sula dan Bawaslu Halmahera Utara menemukan pelanggaran lainnya yang dilakukan tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, beberapa di antaranya masih dalam proses penanganan. Selain itu juga Bawaslu Pulau Taliabu menemukan pelanggaran pembentukan tim relawan AGK-YA, yang kemudian tidak mau memberi keterangan untuk mengklarifikasi hal pelanggaran tersebut. Beberapa temuan pelanggaran lain oleh Tim Relawan AGK-YA juga tidak dapat dikonfirmasi. Dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh paslon selama dalam pelaksanaan PSU, nyatanya dialakukannya Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara ialah karena pada pemungutan suara sebelum PSU ditemukannya

mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap; Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
 3. Penetapan peserta Pemilu
 4. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 5. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 6. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 7. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

Halmahera Barat terdapat pelanggaran berulang yang dilakukan dengan cara-cara berikut : (1) Mencoblos dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku lagi bukti yang ditemukan di Desa Bobaneigo, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao (2) Mencoblos dengan menggunakan KTP yang baru diterbitkan menjelang/beberapa hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang, sedangkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku KTPS yang baru tersebut seharusnya secara otomatis masuk di Halmahera Utara tetapi terdapat pemilih yang menggunakan KTP baru memilih di Halmahera Barat (3) Adanya fakta ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam formulir C-KWK dan C-7 KWK tidak ditandatangani oleh petugas KPPS serta keganjilan penulisan formulir (4) Ditemukan Kartu Keluarga yang baru diterbitkan beberapa hari sebelum Pemungutan Suara Ulang (5) Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang karena diketahui yang bersangkutan adalah pendukung pihak terkait, maka pengguna hak pilih tersebut justru dilarang oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak sedikit pemilih yang kehilangan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara.

- a. Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi” Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan “Peserta Pemilihan

- c. Jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, dimana jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah 1.275.831 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
- d. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 554.734$ suara (total suara sah) = 11.095 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 11.095 suara.
- e. Perolehan suara Pemohon adalah 169.123 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 176.993 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pihak Terkait dan Pemohon adalah $(176.993 \text{ suara} - 169.123 \text{ suara}) = 7.870$ suara (setara dengan 1,4%).

E. Amar Putusan

Setelah membaca laporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan telah dilakukan pertimbangan maka

dari itu Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; setelah membaca permohonan Pemohon dan melakukan pertimbangan mahkamah menimbang bahwa terhadap dalil pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon a quo, oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan.
- 2) Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/PL.03-6-Kpts/82/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bertanggal, 7 Juli 2018, sepanjang perolehan suara di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetawang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanan Kecamatan Taliabu Barat;
- 3) Menyatakan sah hasil perolehan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) desa yaitu Desa Bobaneigo, Desa Pasir Putih, Desa Tetawang, Desa Gamsungi, Desa Dumdum dan Desa Akelamo Kao serta di Kecamatan Sanan dan Kecamatan Taliabu Barat, pada tanggal 7 Oktober 2018, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 36/PHP.GUB-XVI/2018 TENTANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Berarti prinsip dasarnya adalah kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga apakah kepala daerah dipilih langsung atukah tidak langsung diatur dengan Undang-Undang. Namun harus diakui pemilihan langsung sesungguhnya merupakan tindak lanjut realisasi

prinsip-prinsip demokrasi secara normatif yakni jaminan atas bekerjanya prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.

Pemilihan kepala daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah tersebut berada pada bab tentang pemerintahan daerah. Adapun terkait sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil Pemilu. Sehingga sejak Pilkada dimasukkan dalam pengertian “Pemilu”, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan hasil pemilihan umum Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tentu perlu adanya pengawasan dan lain sebagainya, dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adanya permasalahan selama proses pemilihan sehingga dibawa kepada lembaga yang berwenang untuk mengadilinya. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim ialah adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang merupakan penyelenggara dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

Mengenai Pemilihan Umum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pada Bagian Ketigamengatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU, KPU Provinsi, dan juga pada Bab II mengatur tentang Pengawasan Pemilu yang pada bab tersebut mengatur mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu. Dalam kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dimana Termohon yang merupakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dalam amar putusan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan tersebut yakni membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sepanjang perolehan suara di 6 desaserta di Kecamatan Sanana dan Kecamatan Taliabu Barat, selain itu juga menyatakan sah hasil perolehan pemungutan suara ulang di 6 desa serta di Kecamatan Sanana dan Taliabu Barat serta Termohon harus menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Paslon pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan

Tidak hanya sampai di situ, pada masa Khulafaur Rasyidin atau yang biasa dikenal dengan istilah empat sahabat utama nabi, masih banyak sekali konflik yang terjadi. Bahkan, pada setiap masa sahabat ketika berperan menjadi seorang khalifah, pasti akan mendapatkan konflik. Dan setiap konflik antara khalifah tidaklah sama. Konflik-konflik yang terus terjadi itu memuncak pada masa Ali bin Abu Thalib menjabat sebagai Khalifah. Sebab, pada masa itulah umat Islam benar-benar mengalami kehancuran yang luar biasa, yang telah biasa dikenal dengan perpecahan hingga memicu terciptanya golongan atau kelompok-kelompok dalam Islam.

Pada masa Khulafau'Rasyidin semua permasalahan atau konflik langsung ditangani oleh khalifah tanpa melalui pengadilan, karena pada masa khalifah belum terbentuknya pengadilan khusus yang menangani perkara-perkara yang ada di masyarakat, awal mula munculnya pengadilan ialah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemetintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia merupakan penguasa Islam pertama yang membentuk lembaga al-madzalim (peradilan khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk menerima pengaduan kasus-kasus al-madzalim. Untuk itu ia didampingi oleh hakim Ibnu Idris al-Azdi. Jika menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, maka Abdul Malik berkonsultasi meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi.

Kata wilayah al-maza>lim merupakan gabungan dua kata, yaitu wilayah dan al-maza>lim. Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-maza>lim adalah bentuk jamak dari

Pilkada secara langsung seringkali disertai dengan konflik masyarakat, yakni mulai dari tahap pencalonan hingga bahkan berlanjut sampai pasca-pilkada. Konflik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi konflik yang berkepanjangan dan mengarah kepada kekerasan dan terhentinya pemerintahan tentu sangat merugikan dan mencederai makna demokrasi itu sendiri.

Menurut pendapat saya. Jika fiqh siya>sah kita kaitkan dengan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 dimana isi dari putusan tersebut ialah mengenai hasil perselisihan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, jika pada masa kekhalifahan bani umayyah dan bani abasiyah dalam menyelesaikan segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehinga diserahkan kepada khalifah dan diselesaikan atau diputuskan oleh lembaga al-mazalim, yang sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi.

- Kuswara, Engkus. *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Tinjauan Atas Pengisian Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet.1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia". *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Pulungan, Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PHP.GUB-XVI/2018.
- Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*. (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang). 2016.
- S.H. Sarundajang. *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek*. t.tp., Katahast Pustaka. 2005.
- Setyagama, Azis. *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017.
- Siahm, Maruara. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Konspress. 2005.
- Soekarwo DKK. *Administrasi Reform Birokrasi Itu Melayani*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2015.
- Soimin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2013.

- Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Suyuthi, J. Pulungan. *Fiqh Siya> sah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997.
- Syuyuthi, J. Pulungan., *Fiqh Siya> sah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. ed. 1, cet 4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- Syahuri, Taifiqurohman. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Syarifuddin, Amir. *Pemahaman Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya. 1990.
- UU No 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang
- UUD 1945, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4).